

Pemkab Bogor Memperpanjang PPKM Tapi Diturunkan Jadi Level 3

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Perpanjangan PPKM ini dilakukan mengingat PPKM sebelumnya berakhir pada 23 Agustus 2021. Namun, levelnya kini diturunkan menjadi PPKM Level 3.

"Di sejumlah daerah aglomerasi turun dari level 4 ke level 3 tidak terkecuali wilayah Jabodetabek," kata Bupati Bogor, Ade Yasin dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Pemkab Bogor rencananya bakal memperpanjang

PPKM sekaligus mulai berlakukan PPKM Level 3 ini dari tanggal 24 sampai 30 Agustus 2021.

"Sesuai dengan ketentuan dan Instruksi Pemerintah Pusat, Pemkab Bogor mulai tanggal 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021 akan memberlakukan PPKM Level 3," kata Ade.

Ketentuan pemberlakuan-pembatasan di PPKM Level 3 Kabupaten Bogor ini, kata Ade, akan diatur secara terperinci dalam Keputusan Bupati Bogor. Rencananya, ketentuan-ketentuan pembatasan PPKM Level 3 tersebut bakal segera diumumkan dalam waktu dekat ini. ● **gio**

Kota Tangerang Beri Diskon BPHTB dan PBB Hingga 15 Persen

TANGERANG (IM)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, memberikan potongan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai 15 persen mulai 23 Agustus hingga 30 September 2021.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa, mengatakan, program relaksasi BPHTB dan PBB sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021, yang diberikan kepada masyarakat Kota Tangerang dalam upaya meringankan beban pada masa pandemi Covid-19.

"Pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan keringanan pembayaran pajak kepada seluruh masyarakat demi pembangunan yang berkelanjutan," kata Kiki di Kota Tangerang, Selasa (24/8).

Untuk mendapatkan program tersebut, kata dia, masyarakat harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan aturan dalam Perwal Nomor 64 Tahun 2021. Misalnya, untuk pengurangan PBB, wajib pajak tidak boleh memiliki piutang lima tahun sebelumnya.

Sedangkan, untuk penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, hanya diperuntuk-

kan bagi wajib pajak yang memiliki piutang sampai dengan 2020. Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara tunai di beberapa gerai pembayaran pajak, seperti loket Bank BJB, kantor pos, Alfamart dan Indomaret.

Selain itu, kata Kiki, pembayaran nontunai juga dapat dilakukan melalui aplikasi Bapenda Kota Tangerang. "Sekarang pembayaran lebih baik dilakukan dari rumah saja. Masyarakat dapat mengaksesnya lewat aplikasi LinkAja, Tokopedia, Bukalapak, QRIS, BJB Digi, dan Gopay," ujarnya.

Berdasarkan data yang dilansir Bapenda Kota Tangerang untuk pengurangan PBB tahun 2021 dibagi dalam empat buku dengan rincian yakni buku dua dengan ketetapan Rp 100.001 hingga Rp 500 ribu mendapat pengurangan sebesar 15 persen.

Buku tiga dengan ketetapan Rp 500.001 sampai dengan Rp 2.000.000 mendapat pengurangan sebesar 10 persen. Buku empat dengan ketetapan Rp 2.000.001 sampai Rp 5 juta mendapat pengurangan sebesar 8 persen dan buku lima dengan ketetapan lebih dari Rp 5 juta mendapat diskon sebesar enam persen. ● **pp**

IDN/ANTARA



UJICoba PEMBUKAAN PUSAT PERBELANJAAN SAAT PPKM DI YOGYAKARTA

Pengunjung memindai kode sebelum masuk ke pusat perbelanjaan di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (24/8). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan ujicoba pembukaan pusat perbelanjaan saat PPKM level 4 mewajibkan pengunjung menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 untuk masuk ke pusat perbelanjaan.

MANGKRAK 1,5 TAHUN

Ridwan Kamil Jamin Proyek Masjid Al Jabbar Dlanjut

BANDUNG (IM)- Pemprov Jabar akan kembali melanjutkan pembangunan Masjid Al Jabbar tahun ini. Sebelumnya, pembangunan masjid yang berada di Gedebage, Kota Bandung itu dihentikan selama 1,5 tahun karena terimbas badai Covid-19.

"Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar sudah memasuki tahap ketiga yang meliputi pekerjaan detail eksterior dan interior, seperti taman, air mancur, dan fasilitas untuk difabel.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Koswara mengatakan, sebelum wabah, dana yang dialokasikan untuk penyelesaian masjid yang dibangun di atas embung itu mencapai Rp 360 miliar. "Karena teralokasikan Rp 31,5 miliar dari kebutuhan Rp 360 miliar, sisanya kita geser ke tahun depan juga," kata Koswara, Selasa (23/6). ● **pur**

san, Insya Allah bisa diresmikan di akhir tahun depan," ujar Kang Emil.

Sedinya masjid yang berdiri di atas lahan seluas 25,9 hektare itu ditargetkan rampung pada tahun 2021. Sebelum proyek dihentikan, pembangunan Masjid Raya Al Jabbar sudah memasuki tahap ketiga yang meliputi pekerjaan detail eksterior dan interior, seperti taman, air mancur, dan fasilitas untuk difabel.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Koswara mengatakan, sebelum wabah, dana yang dialokasikan untuk penyelesaian masjid yang dibangun di atas embung itu mencapai Rp 360 miliar. "Karena teralokasikan Rp 31,5 miliar dari kebutuhan Rp 360 miliar, sisanya kita geser ke tahun depan juga," kata Koswara, Selasa (23/6). ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENERBANGAN DI BANDARA HUSEIN MENINGKAT

Petugas bandara berjaga di Landasan Pesawat di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/8). Penerbangan di bandara Husein Sastranegara tersebut mulai kembali meningkat usai adanya aturan penurunan harga batas atas untuk tes PCR COVID-19 dan penyesuaian PPKM Level 3 di Bandung setelah sebelumnya sejumlah jadwal penerbangan maskapai banyak dibatalkan.

Wisatawan di Puncak Bogor Berdatangan, Ekonomi Menggeliat

Kembali menggeliatnya aktivitas ekonomi di kawasan Puncak, berimbas pada peningkatan volume kendaraan. Jalur Puncak yang beberapa pekan lalu lenggang setiap akhir pekannya, pada akhir pekan terakhir sudah mulai ramai dan tak jarang membuat kepadatan.

PUNCAK (IM)- Aktivitas ekonomi di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, perlahan mulai mengalami peningkatan. Wisatawan dari dalam maupun luar Bogor sudah berbondong-bondong datang ke kawasan Puncak, khususnya pada akhir pekan.

Kondisi ini pun disyukuri oleh para pedagang kecil mau-

pun pelaku usaha lain di kawasan tersebut. Sebab, mereka terkena imbas dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang diterapkan pemerintah sejak awal Juli lalu.

"Alhamdulillah, (Puncak) mulai ramai," kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puncak, Teguh Mulyana, melalui pesan singkat What-

sApp, Selasa (24/8).

Teguh mengatakan, aktivitas ekonomi di kawasan Puncak meningkat sekitar 60-70 persen. Hal itu terlihat pada akhir pekan lalu. Menurutnya, kondisi ini tergolong cukup baik jika dibandingkan pada beberapa pekan lalu.

Bahkan, pada awal Agustus sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor mengibarkan bendera putih tanda protes perpanjangan PPKM Level 4. Minimnya wisatawan yang datang ke kawasan Puncak, juga pedagang kerap membuang makanan yang jadi dagangannya yang tidak laku.

"Untuk sementara kawasan Puncak sudah mulai hampir 60 sampai 70 persen kondusif. Wisatawan udah mulai banyak kegiatan distri-

busi sudah jalan," ujarnya.

Kendati demikian, Teguh menyayangkan karena kebanyakan wisatawan masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, mereka yang tengah nongkrong di sekitar kebun teh.

Teguh meminta kepada para wisatawan, agar tetap patuhi protokol kesehatan. Sebab, ia khawatir terjadi penularan Covid-19 yang bisa berimbas dengkan kembali diperketat kawasan wisata Puncak.

"Sekarang wisatawan saya perhatikan di pinggir jalan juga banyak cuma tetap masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Kami harap wisatawan di selalu terapkan protokol kesehatan," harapnya.

Kembali menggeliatnya ak-

tivitas ekonomi di kawasan Puncak rupanya juga berimbas pada peningkatan volume kendaraan. Jalur Puncak yang beberapa pekan lalu lenggang setiap akhir pekannya, pada akhir pekan terakhir sudah mulai ramai dan tak jarang membuat kepadatan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasatlantas Polres Bogor, AKP Dicky Pranata, mengakui kondisi tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemeriksaan kepada setiap pengendara. Baik dengan menunjukkan keterangan negatif swab antigen, PCR, atau surat keterangan sudah vaksinasi.

"Pengaruhnya pasti ada. Tapi bicara pelanggaran itu kan dari sektor ekonomi ya, kalau kita pemeriksaan normal seperti biasanya tetap kita lakukan pemeriksaan surat antigen dan vaksin," jelasnya. ● **gio**

Mal di Kota Bogor Boleh Dibuka, Dedie: Roda Ekonomi Kembali Bergerak

BOGOR (IM)- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengaku bersyukur atas pencapaian perubahan status PPKM Kota Bogor dari Level 4 menjadi Level 3. Mal Kota Bogor diperkenankan uji coba operasional. Ia menilai, roda ekonomi kembali bergerak, sehingga banyak warga bisa kembali bernapas.

Dedie melihat, upaya yang dilakukan Forkopimda Kota Bogor untuk menurunkan level Kota Bogor dari resiko tinggi ke sedang berhasil tercapai.

Diharapkan, dengan upaya dan kerja sama yang telah dilaksanakan ini, mendapat dukungan dari masyarakat agar bersama-sama mempertahankan bahkan kalau bisa meningkatkan status zona Covid-19

di Kota Bogor menjadi hijau. "Mari kita bersama-sama untuk terus mengupayakan status ke zona kuning dan hijau, serta mengupayakan Kota Bogor memasuki fase herd immunity," papar Dedie, Selasa (24/8).

Di sisi lain, Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa -Bali hingga tanggal 30 Agustus 2021.

"Tapi satgas tetap akan monitor. Pastikan tidak lengah untuk prosesnya," katanya.

Kata dia, Pemkot Bogor juga memastikan sejumlah fasilitas publik seperti mal, kafe, restoran dan tempat ibadah akan akan dibuka dengan beberapa syarat

"Mal dibuka dengan pembatasan kapasitas 50%, Resto dine in 25%, 2 orang per meja,

hingga 20.00. Tempat ibadah buka maksimal 25% atau 30 orang, untuk sekolah belum. Masih harus tunggu vaksin pelajar 100%," tutup Dedie.

Sebelumnya, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang belum diizinkan untuk diikutsertakan dalam uji coba operasional pusat perbelanjaan pada PPKM level 4 di Jabodetabek. ● **gio**

Apresiasi Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Di Tengah Pandemi Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



KABUPATEN Bogor telah mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memeriksa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dengan hasil opini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam kalinya. WTP merupakan hasil opini tertinggi dalam Audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. Perolehan opini WTP tersebut diumumkan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Bandung secara langsung yang dihadiri Bupati, Wakil Ketua DPRD, Diskominfo dan Kepala Badan BPKAD beserta jajaran.

Opini WTP hasil audit tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat kepada Bupati Kabupaten Bogor secara langsung. Penyerahan hasil laporan audit tersebut sebagai bentuk implementasi dari UU 17 Pasal 31 Tahun 2003 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan pimpinan entitas, untuk diajukan sebagai data pendukung dalam penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang sesuai Permendagri 13 tahun 2006 sebagai entitas pelaporan yaitu mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan kabupaten mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hasil opini WTP yang telah berhasil diraih Kabupaten Bogor 6 kali berturut turut. Adapun kriteria dalam penentuan opini yaitu:

- 1). Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- 2). Kecukupan Informasi
- 3). Efektifitas Sistem Pengendalian Internal
- 4). Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPKAD sebagai tim penggerak roda keuangan kabupaten dalam hal ini bekerja keras untuk menyusun elemen-elemen penting untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dimana sesuai dengan permendagri 13 tahun tahun 2006 bahwa laporan keuangan dibuat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi. Oleh sebab itu opini WTP sendiri merupakan hasil kerja keras dan komitmen, kerjasama, serta komunikasi yang intensif dari seluruh perangkat daerah. Dan opini BPK merupakan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bogor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai tugasnya yaitu Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan



Khususnya Penunjang Bidang Keuangan, sehingga akan berupaya mencapai Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 melalui misi ketiga yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik" dan melalui Misi ketiga ini, berupaya mewujudkan Karsa Maju sebagai salah satu dari PANGAKARSA. BPKAD berupaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif dengan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan ini, BPKAD diharapkan terus konsisten dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang berturut turut menyandang predikat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" serta mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan "Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban".

